



**MENCARI FORMAT PENILAIAN PENDIDIKAN INDONESIA YANG  
MENDUKUNG DAYA SAING BANGSA**

<sup>1</sup> **Purwo Susongko**

<sup>1</sup> Assoc.Prof Bidang Pengukuran & Evaluasi Pendidikan  
FKIP –Universitas Pacasakti Tegal

**ABSTRAK**

Pada survey-survey Internasional prestasi belajar siswa Indonesia tidak pernah beranjak dari 10 besar terbawah. Dari sisi prestasi non akademik seperti halnya nilai-nilai moral dan kebhinekaan, siswa Indonesia ternyata mengalami penurunan yang serius. Sebaliknya menurut survey PISA 2018 justru kepuasan hidup siswa Indonesia jauh melampaui rerata kepuasan hidup siswa di negara-negara maju. Rendahnya prestasi belajar siswa Indonesia ini disebabkan salah satunya karena Sistem Pendidikan Indonesia tidak memiliki ujian yang bersifat *high stakes* / tes beresiko tinggi sehingga motivasi belajar siswa menjadi sangat rendah. Perlu adanya ujian yang bersifat *high stakes* baik untuk keperluan standarisasi hasil belajar ataupun untuk pemetaan studi lanjut siswa.

copyright © 2020 Universitas Pancasakti Tegal (ISBN 978-623-7619-12-3)

□ Alamat korespondensi:  
Dekan FKIP UPS Tegal, Jl. Halmahera  
Km 1. Tegal. Kode pos 52122

Email Penulis:  
[purwosusongko@gmail.com](mailto:purwosusongko@gmail.com)

PENDAHULUAN

Indonesia telah 6 kali mengikuti TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*) pada kelas 8 (SMP) sejak tahun 1999, 2003, 2007, 2011, 2015 dan 2019. Pada kurun waktu 1999-2011 perolehan skor rata rata untuk sains sebesar 405 atau masuk dalam kategori *Low Performance Country* jauh dibawah nilai rata rata sebesar 500. Perolehan prestasi siswa Indonesia untuk Sains pada survey TIMSS tahun 2011 sebesar 406 atau peringkat 40 dari 42 negara yang berpartisipasi pada kelas 8 sedangkan untuk Fisika sebesar 397 atau peringkat 40 dari 42 negara yang berpartisipasi pada kelas 8. Sementara peringkat pertama di capai oleh siswa Singapura dengan perolehan sebesar 602 dan siswa Malaysia menduduki peringkat ke 32 dengan perolehan skor 435 (Martin, Mullis, Foy dan Stanco, 2012: 147). Dan hasil terbaru, yaitu TIMSS 2015 Indonesia berada di peringkat 44 dari 49 negara untuk prestasi belajar di bidang Matematika (Nizam, 2016). Berikut adalah data hasil Survey TIMSS dari tahun 2003 hingga 2015 untuk Bidang Studi Matematika.

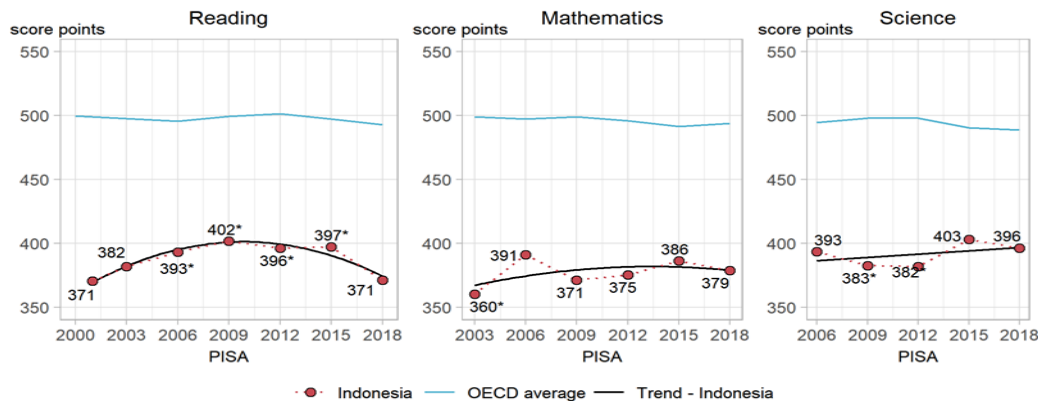
Tabel 1 : Hasil Survey TIMSS untuk Indonesia Pada Matematika

Tahun	Peringkat	Peserta	Rata-rata skor Indonesia	Rata-rata skor Internasional
2003	35	46	411	467
2007	36	49	397	500
2011	38	42	386	500
2015	40	49	397	500

(Hadi & Noveliyosi, 2019)

Sedangkan dalam survai PISA (*Programme for International Students Assesment*) untuk literasi sains, siswa Indonesia menduduki peringkat ke -64 dari 65 negara peserta pada tahun 2012 dan peringkat ke 62 dari 70 negara peserta pada tahun 2015 (OECD, 2012 & OECD, 2016). Hasil yang menggembirakan pada survey PISA 2015, menunjukkan bahwa capaian prestasi belajar IPA disekolah berpengaruh positif terhadap kesadaran lingkungan siswa (Susongko & Afrizal, 2018).

Pada tahun 2018 skor PISA Indonesia untuk matematika berkisar di angka 379 dan sains di skor 396. Sebagai pembanding, China dan Singapura menempati peringkat tinggi untuk skor matematika dengan skor 591 dan 569 (Balitbang Kemendikbud, RI, 2019). Semenjak berperan serta dalam PISA di tahun 2000, perolehan skor PISA siswa Indonesia semua bidang selalu di bawah rerata negara negara OECD dan selalu masuk 10 besar dari bawah. Hal ini ditunjukkan oleh Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1: Trens kemampuan siswa Indonesia dalam survey PISA (OECD, 2019)

Dari Kedua survey Internasional tersebut menunjukkan kinerja pendidikan Indonesia di bandingkan dengan negara negara lain masih sangat rendah . Enam kali Indonesia mengikuti Survey TIMSS dan tujuh kali mengikuti survey PISA selalu memiliki peringkat 10 besar dari bawah. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan mengingat Vietnam sebagai negara berkembang dengan kondisi sosial ekonomi di bawah Indonesia mampu mempunyai skor PISA di atas rerata skor Internasional. Hal ini menjadi sangat ironi karena ternyata indeks kepuasan hidup siswa Indonesia jauh di atas rerata negara –negara OECD maupun rerata Internasional (Balitbang Kemendikbud, RI,2019).

Dalam sebuah riset yang dilakukan LSM *Plan International dan International Center for Research on Women* (ICRW) yang dirilis awal Maret 2015 menunjukkan fakta mencengangkan terkait kekerasan anak di sekolah. Terdapat 84% anak di Indonesia mengalami kekerasan di sekolah. Angka tersebut lebih tinggi dari tren di kawasan Asia yakni 70%.(ICRW, 2015). Minimal ada lima jenis kekerasan dalam dunia pendidikan di Indonesia menurut Soyomukti (2015) yaitu: (1) Kekerasan antar pelajar dalam pendidikan yang sama, (2) Perploncoan dan hubungan senioritas –junioritas, (3) Tawuran pelajar dan mahasiswa, (4) Kekerasan pendidik pada siswa dan (5) pelecehan seksual di sekolah.

Selain itu, hasil survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, menyebut bahwa ternyata ada persoalan paling mendasar pada level kultural bangsa ini. Yakni, berkembangnya pemahaman radikal dan anti toleransi, yang sudah masuk ke ruang pendidikan. Dari 100 SMP serta SMA umum di Jakarta dan sekitarnya, ada 993 siswa yang disurvei, sekitar 48,9 persen menyatakan setuju atau sangat setuju terhadap aksi kekerasan atas nama agama dan moral. Sisanya (51,1 persen) menyatakan kurang setuju atau sangat tak setuju. Di antara 590 guru agama yang menjadi responden, 28,2 persen menyatakan setuju atau sangat setuju atas aksi-aksi kekerasan berbaju agama.(Tempo, 2011). Pada tahun 2012, hasil survei yang dilakukan oleh Yayasan Denny JA dan LSI Community (MI: 2012), menunjukkan bahwa *trend* intoleransi masyarakat Indonesia terus meningkat. Masyarakat merasa semakin tak nyaman akan keberadaan orang lain di sekitarnya. Mereka yang keberatan hidup berdampingan dengan yang berbeda agama sebanyak 15%. Sedangkan mereka yang keberatan untuk hidup berdampingan dengan orang berbeda aliran agama sebanyak 41,8%.

Survei The Wahid Foundation (2016) melaporkan kaum muda terlibat dalam dukungan pada aktivitas kekerasan keagamaan dan terorisme mencapai 76 %. Mendukung aksi-aksi intoleransi mencapai 46 % ( Qodir, 2016). Sementara tahun 2017, The Wahid Foundation melaporkan bahwa Unit kegiatan keagamaan di Jabodetabek melakukan kajian memperjuangkan agama dengan perang mencapai 87 % (Qodir, 2016). Survei Lembaga Wahid Institut juga menemukan bahwa ada sebanyak 11 juta orang mau melakukan tindakan radikal dan intoleran. Hasil riset tahun 2017 oleh Badan Inteljen Negara diketahui ada 39% mahasiswa di Indonesia terpapar ideologi radikalisme. Berdasarkan riset dari Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian ditemukan bahwa 52,3% siswa mendukung aksi kekerasan untuk solidaritas agama dan 14% siswa setuju aksi pengeboman. Lebih lanjut penelitian tersebut menunjukkan ada 25% guru dan 21% siswa mengatakan Pancasila tidak relevan lagi . Penelitian ini dilakukan pada 500 guru dan siswa di wilayah Jabotabek. ( Ariyanto, 2019).

Fakta-fakta di atas, setidaknya menunjukkan bahwa pendidikan karakter , sikap toleransi dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia gagal dibangun oleh dunia pendidikan. Dari apa yang terjadi pada dunia pendidikan, kiranya sulit bila dinyatakan pembangunan pendidikan baik dari aspek akademik maupun dari aspek karakter dikatakan berhasil.Keberagaman yang

harusnya menjadi modal sosial yang luar biasa bagi bangsa Indonesia, ternyata berbuah kerentanan konflik, antialog, dan penyingkiran. Jika persoalan tersebut tak segera diantisipasi, maka eksistensi NKRI akan menjadi taruhannya.

Pada dasarnya kurikulum 2013 hadir untuk menjawab carut marutnya dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum 2013 hadir dengan semangat peningkatan karakter dan kemampuan kreatif siswa. Oleh karenanya dalam kurikulum 2013 menambah jam pelajaran agama dan mengintegrasikan kompetensi dasar agama terhadap mata pelajaran yang lain (Ahmad Yani, 2014). Sayangnya pendekatan yang digunakan masih paradigma pendidikan tradisional dimana agama dianggap akan menyelesaikan permasalahan moral, bukan moral ilmiah yang diandalkan untuk mengatasi kehidupan. Ahmad Wahib (2003), seorang pemikir muda dalam bukunya *Pergolakan Pemikiran Islam* menyatakan: “*Moral itu lebih banyak merupakan produk atau akibat daripada sebab. Moral adalah norma atau cita-cita dan bukan alat penyelesaian. Dia lebih banyak sebagai produk*”.

Pendidikan liberal yang selama ini mulai diusung Pemerintah dengan kebijakan seperti halnya *link and match* dan kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pada dasarnya mereduksi fungsi pendidikan hanya sebatas penyedia pekerja bagi industri. Setidaknya ideologi pendidikan liberal di Indonesia memberikan dampak sebagai berikut; (1) Munculnya permasalahan di sekolah hanya dilihat sebagai kesalahan sistem pendidikan semata-mata tanpa melihat analisis struktural, (2) Guru dipandang hanya sebagai fasilitator belajar saja sehingga hubungan guru dan murid hanya dianggap profesional, (3) Kebebasan individu yang berlebihan sehingga memunculkan kompetisi yang tidak sehat, (4) Komersialisasi pendidikan, (5) Hedonisme di lingkungan sekolah (Soyomukti, 2015).

#### **A. Akar Permasalahan Kualitas Pendidikan di Indonesia**

Apa masalah utama pendidikan kita sehingga belum juga berhasil dalam mencerdaskan Bangsa? Selama ini sistem pendidikan Indonesia cenderung berorientasi pada input dan prosesnya. Pada tahun 2010 Pemerintah berhasil mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan. Peningkatan fasilitas pendidikan, meningkatnya kesejahteraan para pendidik, pemberian beasiswa yang sangat intensif bahkan program sekolah gratis di banyak pemerintah daerah, apakah berdampak terhadap kualitas lulusan sekolah di Indonesia? Input pendidikan seperti sarana dan prasarana serta kurikulum beserta prosesnya, sangat penting bagi keberhasilan seseorang dalam belajar, namun aspek ini saja tidak cukup. Berapapun besarnya anggaran pendidikan dinaikan, betapapun lengkap sarana dan prasarana sekolah, jika muridnya tidak dituntut rajin membaca, belajar dan berlatih, tentu tidak menghasilkan lulusan yang bisa diandalkan.

Sekolah di Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Singapura dan Malaysia adalah contoh bahwa siswa harus belajar sangat rajin sehari-harinya. Hal ini menyebabkan sumber daya manusia di sana meningkat secara tajam dan terbukti membuat mereka sebagai negara yang maju. Padahal di Korea Selatan, misalnya, selama ini banyaknya murid per kelas bisa mencapai 60-65 orang. Hasil Survey PISA 2018 menjawab hal ini semua karena ternyata indeks kepuasaan hidup siswa Indonesia justru sangat tinggi melebihi negara-negara tersebut. Ada apa dengan siswa Indonesia? Apa karena sistem pendidikan Indonesia membuat siswa sangat nyaman? Apakah karena sangat nyaman tersebut mereka menjadi malas belajar? Apakah asumsi siswa Indonesia malas belajar karena semua siswa dapat naik kelas dan lulus dengan mudah?

Kemalasan siswa dalam belajar disebabkan sejak tahun 1972 dimana standar kelulusan tidak digunakan sebagai syarat murid mendapatkan ijazah seperti halnya sebelum-tahun-tahun sebelumnya. Pada masa tahun 1972-1979 kriteria kelulusan sekolah hanya menggunakan

kriteria tamat atau tidak tamat yang ditentukan oleh masing-masing sekolah dengan tidak mengenal Lulus atau Tidak Lulus. Persentase kelulusan sangat tinggi bahkan dapat dikatakan semua peserta didik lulus (100%), namun mutu lulusan tidak dapat diperbandingkan.

Tahun 1984 sampai 2002, ujian nasional disebut Evaluasi Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), diselenggarakan oleh Pemerintah pusat) dan Evaluasi Tahap Akhir (Ebta, diselenggarakan oleh Sekolah. Sayangnya dalam kriteria kelulusan diberlakukan kebijakan penyesuaian (pengontrolan) nilai dengan rumus PQR, yang membuat nilai akhir dalam STTB selalu tinggi. Hal ini bukan saja merupakan sejenis proses "pembodohan" secara nasional (hampir lulus 100%), tetapi juga melestarikan bahkan memperlebar jurang kesenjangan mutu lulusan antar daerah.

Pada tahun 2003, Ebtanas diganti menjadi Ujian Akhir Nasional (UAN). Tujuan UAN adalah untuk menentukan kelulusan, pemetaan mutu pendidikan secara nasional, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kriteria kelulusan UAN tahun 2003 adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 3.00, (c) nilai rata-rata (UAN + UAS) minimal 6.00. Sedangkan pada UAN tahun 2004 kriteria kelulusan adalah (a) memiliki nilai seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional, (b) tidak terdapat nilai < 4.00, (c) nilai rata-rata (UAN + UAS) minimal 6.00. UAN ini dinilai punya kelebihan karena ada resiko tidak lulus, sehingga diasumsikan peserta didik lebih giat belajar dan guru lebih serius dalam mengajar. Inilah yang nantinya dijadikan pemetaan mutu pendidikan di tiap daerah. Di Era masa ini banyak protes dilayangkan pada pemerintah terutama pada sekolah-sekolah yang tidak siap bersaing dan tidak mempunyai itikad baik memperbaiki kualitas.

Pada tahun 2005, istilah ujian berubah menjadi Ujian Nasional (UN). Tujuan ujian adalah untuk menentukan kelulusan, membuat pemetaan mutu pendidikan secara nasional, dan seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian Nasional diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dibantu Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik). Namun pada tahun 2015, nilai UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Sekolah diberi otonomi untuk meluluskan atau tidak meluluskan siswanya. Kondisi ini juga berdampak pada kelulusan yang mudah hingga hampir 100 persen.

Direncanakan mulai 2021 (bahkan bisa saja mulai tahun ini, 2020) Ujian nasional diubah namanya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter tidak dilakukan di akhir jenjang sekolah tetapi di tengah jenjang. Inilah yang paling membedakan format baru ini dari ujian-ujian sebelumnya. *Pastinya akan lulus 100 persen lagi apalagi dengan slogan merdeka belajar*

Hal ini berlangsung terus menerus sehingga ada riset yang mencengangkan kita bersama terkait standar kelulusan. Fakta-fakta itu disampaikan Jusuf Kalla dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (DR HC)-nya dari Universitas Negeri Padang (UNP) pada Sidang Senat Terbuka UNP, Kamis 5 Desember 2019. Fakta-fakta tersebut diantaranya : (1) Soal ujian SD dan SMP tahun 1950 ternyata lebih sulit dibandingkan 2000, (2) soal ujian matematika SD di Singapura atau di Malaysia hampir sama tingkatnya dengan soal ujian SMP kita. Tidak usah bicara soal bahasa Inggrisnya yang lebih jauh lagi," kata dia. Selanjutnya Bapak Yusuf Kalla menyampaikan :

*"Kenapa anak-anak kurang belajar, karena selama beberapa puluh tahun anak-anak itu semua bakal lulus ujian. Bupati dan wali kota turun menekan sekolah dan guru agar meluluskan murid-murid 100 persen. Akhirnya anak-anak merasa tidak perlu belajar karena pasti lulus," kata dia. (IDN TIMES, 2019)*

Dampak lain yang sangat serius dari tidak diterapkannya suatu standar nasional untuk kelulusan ialah terhadap perilaku belajar murid dan perilaku mengajar guru. Bila pada tahun 50 an seorang siswa yang dihukum oleh guru, orang tuanya akan berterimakasih karena guru telah memberikan perhatian khusus, maka dewasa ini bila sedikit saja guru memberi hukuman, maka orang tua murid langsung tidak terima bahkan melaporkannya ke polisi atau media massa. Benar-benar dimanja siswa kita sekarang .

Keadaan lulus 100% juga berdampak buruk pada perilaku mengajar guru. Mereka umumnya merasa aman telah melaksanakan semua kewajiban kurikuler meskipun murid-muridnya tak memahami yang diajarkan. Memang kenyataannya penilaian ataupun angka kredit bagi kinerja guru bukan diukur dari prestasi muridnya, melainkan lebih pada sejauh mana ia telah melaksanakan cara mengajar yang ditentukan. Itu sebabnya kebanyakan guru tak merasa gagal sepanjang seluruh rangkaian tugasnya selesai. Kenyataan bahwa setiap tahun lebih sejuta murid tamat SMA yang berarti telah belajar Bahasa Inggris 4 jam per minggu selama 6 tahun, namun nyaris tak ada yang dapat berbahasa Inggris, tampaknya tak dianggap masalah serius ( Umar, 2004). Dan dalam kondisi demikian hanya sekolah-sekolah dengan komitmen kualitas tinggi saja yang berhasil mempunyai prestasi yang tinggi. Hasil UN tahun 2018 untuk SMA/MA misalnya , dari 10 besar sekolah yang meraih nilai UN tertinggi, 80 % diantaranya adalah sekolah-sekolah swasta.

Produk pendidikan yang tidak standar memunculkan generasi yang “manja” . Adanya tuntutan menjadi PNS secara otomatis tanpa Tes CPNS, penentuan pejabat struktural di lingkungan pendidikan yang tanpa menghiraukan profesionalitas, politisasi guru demi kepentingan elit elitnya, semakin menjauhnya budaya sekolah bahkan sekolah-sekolah negeri dari nilai-nilai Pancasila yang menjaga kebinekaan, munculnya kelas jauh, jual beli ijazah, dan lain sebagainya adalah hasil dari proses pendidikan yang sejak orde baru tidak lagi melaksanakan standarisasi bagi kelulusan siswa.

- B.** Dari berbagai masalah tersebut perlu ada reformasi yang mendalam berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia baik dari sisi filsafat, paradigma, sistem, kurikulum hingga model pembelajaran serta sistem evaluasinya sehingga terjadi perubahan kualitas pendidikan yang signifikan. Paradigma tersebut akan lebih baik berbasis pada orientasi peningkatan sumber daya Bangsa Indonesia agar dapat bersaing dengan Bangsa lain di dunia. **Sistem Penilaian Pada Beberapa Negara.**

Untuk melihat contoh baik dari sistem pengelolaan pendidikan dapat menggunakan referensi hasil survey –survey Internasional. Survey Internasional terutama PISA dan TIMSS menempatkan prestasi siswa Singapura dan negara –negara Asia Timur di urutan sepuluh besar terbaik. Untuk Tiongkok, bahkan pada survey PISA 2018 menjadi negara tertinggi untuk prestasi belajarnya dibanding Singapura yang selama ini selalu menjadi peringkat pertama.

Sistem pendidikan di Tiongkok selama ini berorientasi pada Ujian (Li & Li, 2010). Hal ini memang dari kultur sosial masyarakat Tiongkok sangat mendukung siswa untuk berkompetisi. Dalam sejarah Tiongkok tradisi ujian diturunkan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Bahkan pada Jaman dinasti Han (206 SM – 220 M) tradisi seleksi untuk menjadi pegawai kerajaan sudah dimulai. Kebijakan Pemerintah Tiongkok yang hanya membolehkan satu anak setiap keluarga juga mendorong motivasi keluarga di Tiongkok agar anaknya sukses. Demikian pula peningkatan kesejahteraan rakyat Tiongkok membuat orang tua juga menuntut agar anaknya belajar dengan rajin. Siswa di Tiongkok mempunyai beban akademik yang berat sejak masuk sekolah dasar hingga di Perguruan Tinggi. Dalam satu dekade terakhir mulai banyak dikritik untuk memberi kebebasan siswa Tiongkok dalam belajar.

Hal ini dipicu oleh kurangnya nilai-nilai inovatif yang muncul dari sistem pendidikan yang selama ini dilaksanakan dan berakibat tidak banyak warga negara Tiongkok yang mendapatkan hadiah Nobel (Li & Li, 2010).

Belanda terkenal di dunia sebagai negara dengan standar internasional di bidang pendidikan. Sistem pendidikan di Belanda sangat berbeda dengan sistem pendidikan di Asia, Amerika, bahkan di sebagian Eropa. Salah satu perbedaannya terletak pada sistem penjurusan yang sudah dimulai sejak pendidikan di tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis siswa. Sistem pendidikan di Belanda diawasi dan menjadi tanggung jawab pemerintah. Mata pelajaran yang diajarkan di semua jenis sekolah diatur oleh undang-undang dengan target-target yang harus dicapai. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memastikan kualifikasi yang sama di seluruh negeri dan juga sebagai dasar penempatan siswa dalam jenis sekolah yang sesuai. Ujian dilaksanakan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Sains. Untuk sekolah vokasi dapat menyelenggarakan ujian sekolah namun tetap dilakukan validasi oleh para pakar yang terkait (Unit, 2007).

Di Jerman, latar belakang sosial menjelaskan 22,8% dari varian prestasi matematika siswa berusia 15 tahun. Sebaliknya, di Kanada, Finlandia, dan Islandia, latar belakang sosial menjelaskan varians hanya 10% atau kurang (Freitag, & Schlicht, 2009). Hal ini mempunyai makna bahwa latar belakang sosial sangat berpengaruh terhadap prestasi belajar di Jerman. Mulai ajaran 2004/2005, semua negara bagian di Jerman mulai menerapkan standar yang mengikat secara nasional di sekolah (Huber, & Gördel, 2006). Pada tahun 2007 di semua negara bagian di Jerman telah mendirikan Institut Pengembangan Kualitas dalam Sistem Pendidikan (Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen [IQB]), suatu lembaga semi independen di tingkat federal yang terhubung dan bekerjasama dengan Universitas Humboldt di Berlin. Sama halnya di Belanda, semenjak sekolah menengah, sistem pendidikan Jerman melakukan pemetaan kemampuan siswa semenjak dari sekolah dasar kelas 5 (10 tahun). Dari sini siswa akan memilih tiga jalur dengan perbedaan yang jelas mulai dari jalur yang membutuhkan hanya untuk bekerja (sampai kelas 9 atau 10) atau jalur masuk universitas hingga kelas 13 (Isri, 2015). Diperlukan banyak tes yang terstandar untuk melakukan pemetaan ini namun tidak ada ujian nasional yang menentukan kelulusan setiap akhir jenjang sekolah.

Selama puluhan sistem pendidikan di Australia menerapkan sistem evaluasi eksternal untuk menentukan kualifikasi siswa dan sertifikasi. Setelah Perang Dunia II semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada pendidikan dasar dan menengah, diberlakukan kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Pada semua sistem, sekolah bertanggung jawab melakukan ujian untuk tiap level kecuali pada tingkat akhir pendidikan menengah. Pada akhir Sekolah menengah dilaksanakan ujian eksternal. Sertifikat pertama yang diterima murid adalah pada akhir tahun ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah, atau kalo di Indonesia pada level SMP. Setelah SMP siswa dapat memilih program sekolah untuk persiapan ke Perguruan tinggi (Senior Secondary School) atau sekolah kejuruan. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi dilaksanakan pada tahun pendidikan ke-12, berdasarkan ujian eksternal (Isri, 2015).

Sistem pendidikan Jepang tidak mengenal Ujian Nasional sebagai syarat kelulusan. Penilaian kelulusan siswa SMP dan SMA tidak berdasarkan hasil final test, tapi akumulasi dari nilai ulangan harian, ekstra kurikuler, mid test dan final test. Namun demikian untuk masuk SMA dan Perguruan tinggi menggunakan tes yang cukup standar. Hal ini disebabkan ada lima jenis SMA yang mempunyai standar berbeda karena mempunyai tujuan yang berbeda. Misalnya pada SMA elit digunakan untuk siswa yang akan masuk Universitas terbaik di Jepang, SMA non elit untuk masuk Universitas non favorit, SMK untuk siswa yang akan bekerja, SMA bagi siswa yang tidak dapat melanjutkan kuliah, dan terakhir SMA bagi siswa yang tidak mampu tetapi memiliki kemampuan yang baik (Wulandari, 2014). Untuk masuk universitas, siswa

lulusan SMA diharuskan mengikuti ujian masuk universitas yang berskala nasional. Ujian masuk universitas dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama secara nasional dimana soal ujian disusun oleh Kementrian Pendidikan yang terdiri dari lima pelajaran, sama seperti ujian masuk SMA. Tahap kedua, siswa harus mengikuti ujian masuk yang dilakukan masing-masing universitas, yaitu ujianmasuk universitas. Skor kelulusan adalah akumulasi ujian masuk nasional dan ujian di setiap perguruan tinggi

Pendidikan di Finlandia sama sekali tidak menerapkan ujian dari Tk hingga sekolah menengah. Untuk sekolah menengah ada dua pilihan yaitu : (1)Upper Secondary School (3 th). Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang universitas, (2) Vocational Schools and Apprenticeship Training(SMK, 3 tahun).Sekolah ini diperuntukkan bagi siswa yang ingin melanjutkan ke dunia kerja . Untuk memilih keduanya berdasarkan pilihan bukan berdasarkan tes. Ada Ujian Nasional Matrikulasi, untuk menentukan kualifikasi masuk perguruan tinggi, ujian ini bersifat sukarela. Kompetensi yang diukur: Bidang bahasa Ibu , tetapi dapat memilih tiga mata pelajaran lain dari kelompok berikut : bahasa kedua nasional, bahasa asing, matematika, atau studi umum yang meliputi sains dan humaniora. Untuk bahasa dan matematika, ada dua tingkat ujian yaitu dasar dan lanjutan(Wulandari, 2014).

### C. Membangun Sistem Penilaian Pendidikan Indonesia Yang Berdaya Saing

Untuk menyusun sistem penilaian pendidikan yang mendukung dan berorientasi terhadap mutu di Indonesia sangatlah sulit. Hal ini disebabkan dibutuhkan dukungan politik yang kuat agar komitmen yang telah dibangun dapat dilaksanakan dengan baik. Sebenarnya permasalahan bagi masyarakat pendidikan di Indonesia bukan terkait apakah ada ujian nasional atau ujian sekolah, namun terletak kepada integritas para penyelenggara pendidikan di Indonesia. Ujian nasional yang bersifat high stake sangat baik untuk memberi motivasi siswa dan standarisasi kualitas namun bila dalam pelaksanaan banyak penyelewengan sama saja merupakan suatu pembohongan. Ujian sekolah juga cukup baik dilaksanakan asalkan pelaksana di sekolah memiliki integritas dan memiliki orientasi pada mutu, bukan berniat meluluskan 100 % demi gengsi sekolah . Dalam penyusunan kebijakan sistem penilaian benar-benar harus komprehensif melibatkan aspek filosofi,teori, politik , pedagogik dan kepentingan Bangsa dan negara dimasa depan.

Seorang Filsuf Jawa baru KGPAA Mangkunagara IV dalam karyanya serat wedhatama menjelaskan tentang perlunya usaha yang serius dalam menuntut ilmu , *ngelmu iku kelakone kanthi laku*( Astuti, 2018).Laku dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai usaha yang bersungguh-sungguh untuk mencapai cita cita yang diinginkan sehingga terjemahan bebas dari kalimat tersebut adalah bahwa menuntut ilmu harus dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh penuh dengan perjuangan. Dalam teori pendidikan Jawa kuno ( Susongko,2017), ada lima domain yang dikembangkan sebagai hasil pembelajaran yang saling berkorelasi, salah satunya adalah aspek kesadaran. Menumbuhkan kesadaran kepada siswa dalam proses pembelajaran dibutuhkan banyak perlakuan sehingga motivasi belajar siswa semakin kuat dan menjadi pribadi yang tangguh.

Kong Zi sebagai seorang Filsuf dari Tiongkok menjelaskan bahwa pentingnya belajar sejak kecil sebagai modal utama dalam kehidupan. Siswa harus dipaksa untuk menjadi pribadi pembelajar sehingga dapat beradaptasi dilingkungan dan kondisi manapun. Konfusius menjelaskan pentingnya belajar sehingga ditekankan enam kualitas dalam belajar, yaitu: 1. Kebajikan tanpa belajar mengakibatkan ketololan 2. Kesadaran tanpa belajar mengakibatkan pemborosan 3. Keyakinan tanpa belajar mengakibatkan kejahatan 4. Keterusterangan tanpa



belajar mengakibatkan ketidaksabaran 5. Keberanian tanpa belajar mengakibatkan ketidaktenteraman 6. Kekuatan tanpa belajar mengakibatkan kesombongan( Wisnu,2010).

Dalam tataran praktis, penulis mencoba melakukan observasi dan wawancara terhadap pengelola pendidikan sekolah yang masih sangat kuat berorientasi terhadap kualitas mutu pendidikan.Salah satunya Ir Adinoto ,pembina yayasan yang menyelenggarakan sekolah THHK ( Tunas Hidup Harapan Kita) Kota Tegal dimana ada rumusan beberapa premis yang perlu dipikirkan sehingga Indonesia masih membutuhkan standarisasi lulusan. Premis tersebut adalah :

1. Hakiki kodrat manusia adalah “malas”,tanpa ada tekanan ,kebutuhan,kepentingan, lebih menyukai diam daripada bekerja atau berjuang.
2. Manusia tidak sama satu dengan yang lain sehingga perlakuan yang diberikan harus adil , dimana adil itu bukan berarti harus sama
3. Manusia hidup menghadapi banyak tantangan dari lahir sampe meninggal jadi jangan membuat siswa dilindungi dari semua tantangan justru diajarkan banyak tantangan sejak kecil
4. Sekolah adalah seleksi , karena potensi akademik setiap siswa berbeda beda sehingga dalam waktu yang sama , tidak selalu semua siswa mampu mencapai hasil yang sama. Demikian pula minat siswa terhadap pelajaran juga berbeda beda tergantung dari bakat dan kemampuan awal masing-masing.

Terkait landasan filosofis tersebut sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa sekarang adalah bagaimana mereka mempunyai mau dan melakukan aktivitas dalam belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi. Siswa harus diberi kesadaran bahwa untuk meraih masa depan yang gemilang perlu banyak berjuang , belajar dengan rajin untukmencapai cita cita. Bahwa sekolah sebenarnya tempat untuklatihan menghadapi ujian sebenarnya di masyarakat.

Permasalahan yang muncul selama ini tidak ada ujian yang bersifat *high stakes* ( ujian yang memberikan konsekuensi penting untuk para pesertanya , misalnya menentukan lulus atau tidak lulus,menentukan lanjut atau tidak lanjut, atau menentukan nasib lainnya). Bila tidak ada ujian yang dianggap serius bagi siswa maka mereka tentu tidak mau belajar dan tentu pula tidak sibuk dengan belajar. Mereka sangat nyaman bahkan kepuasan hidup siswa Indonesia sangat tinggi melebihi siswa di negara-negara maju. Dengan cara belajar yang sangat santai memungkinkan mereka untuk beraktivitas diluar kegiatan akademik sehingga munculah kenakalan remaja , penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya.

Berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tersebut,penulis memberikan beberapa rumusan yang dapat dipertimbangkan dalam pengembangan sistem penilaian pendidikan di Indonesia . Rumusan tersebut adalah :

- (1) Permasalahan utama kualitas pendidikan di Indonesia terletak pada integritas para penyelenggara negara di bidang pendidikan. Bila semua semua pihak memiliki integritas yang tinggi apakah menggunakan Ujian Nasional ( UN) atau Ujian Sekolah Bertaraf Nasional (USBN) akan memberikan hasil yang sama dimana hasil tersebut dapat digunakan untuk kepentingan siswa maupun perbaikan pembelajaran.
- (2) Tetap diperlukan ujian yang bersifat high stake selama jenjang pendidikan pra perguruan tinggi. Hal ini dapat dilaksanakan pada akhir SMP atau yang sederajat atau

- (3) pada akhir SMA atau yang sederajat. Bila tidak menginginkan status lulus atau tidak lulus, pemerintah minimal dapat memberikan pemetaan kemampuan siswa berkaitan dengan studilanjut siswa. Misalnya bila dilaksanakan di akhir SMP, bisa digunakan untuk membedakan siswa yang layak ke SMA dan yang hanya bisa ke SMK, demikian pula bila dilaksanakan diakhir SMA akan lebih banyak lagi keputusan-keputusan yang bisa dibuat sebagai rekomendasi siswa ketika studi lanjut di perguruan tinggi.
- (4) Konten Ujian di sekolah atau ujian yang bersifat *high stakes* sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi abad ke 21 (***Communication, Collaboration , Crithical Thinking & Problem Solving , Creative , Innovative& Literacy***) sehingga tidak berbasis konten namun lebih kepada ketrampilan berfikir. Isi pelajaran hanya digunakan sebagai konteks dalam mengukur ketrampilan berfikir, dan porsinyapun semakin dikurangi sesuai kenaikan jenjang sekolah.
- (5) Pada level provinsi maupun kabupaten atau kota perlu memiliki lembaga testing yang mandiri sehingga dapat mengembangkan kualitas asesmen pendidikan yang komprehensif untuk kepentingan siswa di setiap daerah
- (6) Perluanya penguatan kompetensi guru dalam melaksanakan *clasroom assesment*

#### **D. Kesimpulan**

Sistem Penilaian di Indonesia masih membutuhkan tes yang bersifat *high stakes* untuk keperluan standarisasi hasil belajar ataupun untuk pemetaan studi lanjut siswa. Dari sudut pandang kepentingan siswa , tes yang *high stakes* juga dapat untuk memotivasi Siswa dalam belajar bahkan pada akhirnya memaksa siswa untuk belajar .Tes tersebut tidak selalu tes dalam skala besar (*large scale*) yang menentukan kelulusan namun bisa juga tes yang berbasis kelas asalkan dalam penyelenggaraanya dilaksanakan oleh para penyelenggara tes yang berintegritas sehingga menghasilkan tes yang berkualitas baik dari segi pelaksanaanya maupun penetapan hasilnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, A. (2019). Konstruksi dan Analisis Model Matematika Radikalisme. *Jurnal Komputer dan Informatika*, 7(2), 96-101.
- Astuti, R. (2018). *NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM SERAT WEDHATAMA KARYA KANJENG GUSTI PANGERAN ADIPATI ARYA MANGKUNEGARA IV* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Balitbang Kemendikbud, RI (2019). Pendidikan di Indonesia belajar dari hasil PISA 2018 **diakses dari**  
<http://repositori.kemdikbud.go.id/16742/1/Laporan%20Nasional%20PISA%202018%20Indonesia.pdf>
- Chung, J. (2015). International comparison and educational policy learning: Looking north to Finland. *Compare: A Journal of Comparative and International Education*, 45(3), 475-479.
- Freitag, M., & Schlicht, R. (2009). Educational federalism in Germany: Foundations of social inequality in education. *Governance*, 22(1), 47-72.
- Hadi, S., & Novaliyosi, N. (2019, November). TIMSS INDONESIA (TRENDS IN INTERNATIONAL MATHEMATICS AND SCIENCE STUDY). In *Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers*.
- Huber, S. G., & Gördel, B. (2006). Quality assurance in the German school system. *European Educational Research Journal*, 5(3-4), 196-209.
- ICRW .(2015). *Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan Di Sekolah*. Retrieved From <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>
- IDN TIMES ( 5 Desember 2019): JK Ungkap Fakta Buruk Pendidikan Indonesia Sebelum Ada Ujian Nasional, diambil dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/umi-kalsum-1/jk-ungkap-fakta-fakta-pendidikan-indonesia-sebelum-ada-ujian-nasional/full>
- Isri, S. (2015). Konsep Pendidikan Jerman dan Australia; Kajian Komparatif dan Aplikatif terhadap Mutu Pendidikan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 25-47.
- Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), Oktober 2010-Januari 2011, Survei Perilaku Keagamaan Kaum Muda Indonesia.
- Li, W., & Li, Y. (2010). An Analysis on Social and Cultural Background of the Resistance for China's Education Reform and Academic Pressure. *International Education Studies*, 3(3), 211-215.

- Martin, M. O , Mullis, I. V. S., Foy, P., & Stanco, G.M. (2012). *TIMSS 2011 International Results in science*. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Boston College.
- Nizam. 2016. Ringkasan Hasil-hasil Asesmen Belajar Dari Hasil UN, PISA, TIMSS, INAP. Puspendik
- OECD(2019). PISA 2018 . Country Note : Indonesia. retrieved from [https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018\\_CN\\_IDN.pdf](https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_IDN.pdf)
- OECD .(2012). PISA 2012 Result in Focus . retrieved from <https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview.pdf>
- OECD .(2016). PISA 2015 . Country Note : Indonesia. retrieved from <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1054>
- Qodir, Z. 2016. Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. *Jurnal Studi Pemuda*, 5(1), 429-445.
- Soyomukti ,N, (2015) . *Teori-Teori Pendidikan* .Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Susongko, P., & Afrizal, T. (2018). The Determinant Factors Analysis of Indonesian Students' Environmental Awareness in PISA 2015. *Jurnal Pendidikan IPA Indonesia*, 7(4), 407-419.
- Tempo, 27 April 2011. Sekolah Diminta Aktif Bendung Paham Radikal . <https://nasional.tempo.co/read/330309/sekolah-diminta-aktif-bendung-paham-radikal/full&view=ok>
- Umar, Y (2004). Pengembangan Pendidikan Berbasis Mutu. Makalah utama *Seminar Nasional* Rekrayasa Sistem Penilaian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Yogyakarta : Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia ; maret 2004.
- Unit, D. E. (2007). The education system in the Netherlands 2007. *The Hague: Ministry of Education, Culture and Science*.
- Wahib , A (2002). *Pergolakan Pemikiran Islam (Catatan Harian)*. Jakarta:LP3ES
- Wisnu, (2010) . Pemikiran Konfusius Dalam Pendidikan . *Jurnal ISTORIA*, 7 (2),14-28
- Wulandari, R. (2014). Makalah Perbandingan Pendidikan di Indonesia, Finlandia, dan Jepang.
- Yani, A (2014). *Mindset Kurikulum 2013*. Bandung: Alfabeta.
- Yayasan Denny JA dan LSI Community. 2012. *Laporan Kehidupan Keagamaan Indonesia*. Zainal Abidin Bagir, Suhadi dan Endy